

INDONESIA CERDAS 2020

J. Eka Priyatma – rektor@usd.ac.id

Abstrak

Untuk mengembangkan perguruan tinggi sehingga mampu mengatasi persoalan pembangunan nasional maupun persoalan peradaban bangsa, Pemerintah diharapkan menggunakan pendekatan baru yang lebih sesuai. Pertama, Pemerintah harus memperjelas dan membedakan peran antara PTN dan PTS. Kedua, Pemerintah harus memandang PTS sebagai mitra yang harus difasilitasi dan bukannya dikendalikan karena PTS sejatinya membantu menutup ketidakberdayaannya mencerdaskan bangsa. Ketiga, pendekatan pengembangan PT yang dilakukan pemerintah haruslah lebih bersifat esensial yang sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya akademik dan menjauhkan diri dari pendekatan yang bersifat administratif dan formalistik.

Kata kunci : *PT, PTN, PTS, mencerdaskan, peran pemerintah.*

1. Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, umat manusia dewasa ini mengalami persoalan besar menyangkut eksistensi kebersamaannya mempertahankan kelangsungan hidup di muka bumi. Persoalan pangan, kesehatan, lingkungan hidup dan pertumbuhan jumlah penduduk menyadarkan kita akan bahaya besar yang mengancam perdamaian, sistem ekonomi, sistem produksi serta kebudayaan umat manusia. Ketika sumber daya alam sudah demikian terkuras sejak bangkitnya revolusi industri maka tinggal pengetahuanlah yang dapat menyelamatkan kita semua.

Hal ini tampak sangat jelas ketika kita memandang sebuah negara yang telah maju ilmu pengetahuannya. Negara tersebut menjadi lebih sejahtera meskipun memiliki sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar harus dapat menguasai ilmu pengetahuan karena akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan mengatasi persoalan peradaban di atas (UNESCO, 1995-2005). Secara lebih spesifik, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia dan mempunyai sumber daya alam yang melimpah, harus mampu menguasai ilmu pengetahuan mutakhir demi semakin sejahteranya masyarakat Indonesia di satu sisi dan di sisi lain mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi persoalan umat manusia.

Karena pengembangan ilmu pengetahuan berlangsung secara sistematis, terstruktur dan masif terjadi di perguruan tinggi (PT) maka komitmen kita untuk membangun PT yang dapat terus berkembang merupakan keharusan dan menjadi pusat perhatian semua pihak terutama

pemerintah. Hal ini sangat mendesak untuk kita perhatikan karena dibanding dengan negara-negara tetangga yang seusia, kualitas PT di Indonesia belum menggembirakan. Salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah membangun kepercayaan diri untuk melakukan perubahan sistemik terhadap sistem-sistem internal maupun eksternal PT yang berpengaruh langsung terhadap kualitas PT.

2. Tantangan PT

Tentu saja masalah pokok yang dihadapi oleh PT di Indonesia adalah masalah kualitas dan kuantitas hasil kegiatan tridharma. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya kita tahu apa yang menjadi akar masalahnya. Selama 15 tahun terakhir, Pemerintah lewat berbagai institusi dan kebijakannya mengandaikan akar masalahnya terletak pada manajemen pengelolaan tetapi berada di level teknis operasional. Oleh karena itu, sangat dapat kita mengerti Pemerintah menggelontorkan dana besar bagi program-program penguatan kapasitas manajemen PT. Pada saat yang sama Pemerintah juga mengeksekusi berbagai peraturan dengan fokus tunggal mengendalikan sistem operasional PT pada level teknis operasional.

Sementara itu, persoalan utama yang dihadapi PT jauh lebih mendasar dari persoalan teknis manajerial yakni persoalan budaya dan tradisi akademik yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran, konsistensi, keterbukaan, dan penghormatan dan kebebasan akademik. Salah satu contoh sederhana betapa PT jauh dari budaya dan tradisi akademik adalah digunakannya apa yang disebut pakta integritas dalam LKD yang membatasi beban kerja dosen maksimal 16 sks tetapi sistem LKD sendiri memungkinkan untuk melanggarnya (dengan adanya opsi beban lebih).

Pendekatan untuk menumbuhkan PT memakai pintu pengendalian manajemen operasional PT tidak akan mampu secara signifikan meningkatkan kualitas kegiatan tridharma tetapi malah sebaliknya memunculkan budaya dan praksis yang justru bertentangan dengan nilai-nilai penopang budaya akademis. Yang akhirnya menyibukkan PT adalah urusan administrasi dan formalisasi kegiatan tridharma. Oleh karena itu, sangat mudah kita mengerti bahwa saat ini PT lebih menjadi lembaga birokratis administratif ketimbang sebuah lembaga yang berfokus kepada hal-hal esensial pengembangan ilmu dan pembelajaran. Suasana ini melebar dan menyebar ke mana-mana, memasuki ruang-ruang kelas dan tempat-tempat seminar. Bukankah di banyak seminar ‘ilmiah’ yang penting justru sertipikatnya ketimbang ‘diskusi’ ilmiahnya. Dalam pertemuan dengan para peneliti yang mendapat hibah dari Dikti, akal sehat sederhana sekalipun

bahkan tidak dapat digunakan untuk mengatasi betapa dana sudah sangat terlambat cair tetapi pengeluaran tidak boleh dilakukan sebelumnya dan penelitian harus selesai pada waktunya. Segala argumentasi dan nalar sederhana tidak diterima karena yang pokok 'secara administratif tidak melanggar' dan masuk tiadaknya di akal menjadi nomor dua!

3. Tantangan PTS

Dibandingkan dengan PTN, PTS mengalami tantangan yang lebih besar dari apa yang saya uraikan di atas. PTS menghadapi tantangan tambahan berupa kemandirian finansial. Lain dengan PTN, PTS hanya mendapat sedikit bantuan finansial Pemerintah dan besarnya bantuan tersebut tidak sebanding dengan bantuan yang diterima PTN. Sementara itu, tuntutan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah menyamaratakan PTN dan PTS. PTS merasa diperlakukan tidak adil misalnya ketika proses akreditasi menuntut rata-rata biaya pendidikan per mahasiswa memakai acuan PTN. Hal ini dapat dibaca sebagai PTS tidak boleh efisien. Dengan kata lain, Pemerintah yang tidak banyak membantu pendanaan PTS tetapi malah menuntut PTS untuk tidak efisien. Selain menghadapi tantangan finansial yang membawa banyak konsekuensi munculnya tantangan lain seperti penyediaan sumber daya manusia yang relevan dan berkualitas, PTS juga menghadapi tantangan pemenuhan standard mutu yang semakin ketat diterapkan Pemerintah tetapi seringkali tidak terkait langsung dengan peningkatan kualitas tridharma. Pemenuhan standard mutu akhirnya banyak dilakukan dengan pendekatan 'akal-akalan' dan formalitas. Dengan ini semua, banyak pihak di PTS sangat sibuk tetapi sebenarnya malah menjauhkan diri dari esensi kegiatan tridharma.

4. Beberapa Usulan

Meskipun usia PTN dan PTS di Indonesia masih relative muda dibandingkan dengan usia PT di negara maju tetapi jika Pemerintah mampu menempatkan diri dengan tepat maka PT di Indonesia akan berkembang lebih optimal. Berikut adalah gagasan pengembangan PT di Indonesia sesuai dengan tantangan yang diuraikan di atas.

a. Fokuskan PTN pada pengembangan Program Pasca Sarjana dan Sarjana

Dengan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia lewat APBN maka PTN diandaikan mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk fokus pada penelitian daripada kepada pengajaran. Untuk itu, PTN sebaiknya tidak membuka program vokasi setingkat D3 apalagi D2 dan D1 malah kalau mungkin jumlah mahasiswa S2 dan S3 sama dengan jumlah

mahasiswa S1. Dengan kebijakan ini, kita berharap semua PTN secepatnya menjadi universitas riset yang mempunyai reputasi internasional.

Karena didukung (didanai) oleh seluruh rakyat maka PTN harus memilih merekrut mahasiswa yang 'tidak mampu' dibanding mahasiswa yang mampu apabila kedua mahasiswa ini mempunyai potensi akademik yang sama. Dengan kata lain PTN harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang mempunyai potensi akademik tinggi.

b. Kembangkan sistem akreditasi untuk PTN dan PTS yang independen

PTN harus diakreditasi sebagai wujud pertanggung-jawaban karena didanai oleh rakyat. Idealnya badan yang mengakreditasi adalah lembaga independen baik lembaga nasional maupun internasional. PTN boleh memilih lembaga akreditasi tetapi pemerintah menetapkan lembaga akreditasi yang diakui dan menentukan peringkat setiap lembaga yang diakui. PTN didorong untuk terakreditasi oleh lembaga yang lebih tinggi peringkatnya.

Seperti halnya PTN, PTS juga diberi kebebasan untuk memilih lembaga akreditasinya dan tidak bersifat wajib. Karena jati dirinya yang mandiri secara finansial, PTS akan secara otomatis meningkatkan mutunya dengan caranya sendiri. Akreditasi harus dipandang sebagai salah satu cara saja bagi PTS untuk memperoleh reputasi di mata masyarakat. Pemerintah sebaiknya memberi kebebasan bagi kreatifitas, inovasi dan terjaganya efisiensi pengelolaan PTS. Pemerintah cukup menetapkan standard kelulusan yang dapat direkrut menjadi pejawai negeri atau pemerintah mengembangkan sistem saringan pegawai negeri yang baik. Oleh karena itu tidak perlu mengaitkan lulusan PTS yang boleh melamar sebagai pegawai negeri dengan status akreditasi program studi. Akreditasi oleh BAN untuk semua prodi untuk PTN dan PTS selama ini selaian berat dari sisi operasional tetapi juga justru mengalihkan perhatian ratusan doktor dan professor ke bidang administrasi padahal sumbangan ilmiah peneliti Indonesia masih rendah.

c. Posisikan PTS sebagai mitra Pemerintah yang harus difasilitasi

Kehadiran PTS pertama-tama harus dipahami sebagai peran serta aktif masyarakat menutup kekurangan kemampuan pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Dengan pemahaman seperti ini maka PTS tidak boleh dipandang sebagai pesaing PTN apalagi dicurigai sebagai entitas bisnis yang mengeruk keuntungan besar dari kegiatan pelayanan pendidikannya. Pemerintah harus menghargai inisiatif dan kerja keras masyarakat yang secara

mandiri berjuang memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, terjangkau dan tidak menuntut banyak dari pemerintah. Oleh karena itu, PTS sangat berharap bahwa Pemerintah lebih berfungsi sebagai fasilitator ketimbang sebagai regulator.

d. Bebaskan PTS membuka dan menutup program studi

Karena jati dirinya yang mandiri maka sebenarnya pembukaan dan penutupan program studi oleh PTS haruslah berlangsung secara mudah dan cepat. Saat ini, untuk membuka sebuah program studi butuh waktu bertahun-tahun dan melewati proses yang rumit. Sebaiknya pemerintah cukup menetapkan prasyarat minimal dan kalau prasyarat itu terpenuhi maka Pemerintah langsung menerbitkan surat izin. Setelah itu Pemerintah tidak perlu menanggung konsekuensi apa-apa. Biarlah PTS mengelola sendiri prodi baru tersebut sampai akhirnya mendapatkan apresiasi atau pengakuan dari masyarakat. Karena masih rendahnya angka partisipasi kasar masyarakat mengakses pendidikan tinggi maka Pemerintah mestinya justru wajib memfasilitasi kelahiran program studi baru asal program studi dapat mempertanggung-jawabnya pemanfaatan dukungan (dana) dari pemerintah. Mestinya kita belajar banyak dari dunia pers di mana di era Orde Baru, SIUPP adalah segala-galanya. Tetapi ketika SIUPP dicabut, dunia pers malah lebih sehat dan berkembang menjadi salah satu pilar demokrasi yang baik dan dewasa.

5. Penutup

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat UUD '45 dan oleh karenanya Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib mengemban amanat ini. Karena besarnya peran Pemerintah dalam pengembangan Pendidikan Tinggi maka kebijakan dan regulasi yang dibuatnya haruslah sesuai dengan nilai-nilai penopang kehidupan akademik. Oleh karena itu Pemerintah diharapkan lebih mendorong terjadinya otonomi pengelolaan, pemberian fasilitas pengembangan lembaga dan meminimalkan kewajiban administratif perguruan tinggi.